

**ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(STUDI ATAS KONSEP ADVOKASI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
HESBUL BAHAR
03370326**

PEMBIMBING

- 1. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**



UIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dalam praktik politik di hampir seluruh negara modern saat ini, baik yang bercorak demokratis maupun totaliter, kehadiran partai politik tidak dapat dielakkan. Di negara-negara demokratis partai politik dipakai sebagai sarana untuk mewujudkan hak rakyat dalam menentukan figur-figur yang akan menjadi pemimpinnya, sedangkan di negara-negara totaliter, partai didirikan oleh elite politik dengan pertimbangan bahwa rakyat perlu dibina agar tercipta stabilitas yang berkelanjutan.

Partai Kebangkitan Bangsa lahir dan ada dalam kondisi seperti diatas. Konsep advokasi lahir untuk menjawab kebuntuan upaya deparpolisasi dimasyarakat, selain itu secara aplikatif tujuan dari konsep ini adalah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi partai politik sebagai “kepanjangan tangan” rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Pokok bahasan skripsi ini adalah bagaimana ruang lingkup yang melatarbelakangi konsep advokasi tersebut serta bagaimana implementasinya kedalam produk perundang-undangan dan kebijakan publik lainnya. Skripsi ini kepustakaan murni, dalam arti semua dokumentasi PKB, yang terkait dengan konsep advokasi dan beberapa buku lainnya yang terkait dengan konsep advokasi PKB. Ada dua pokok bahasan yang dibahas, yakni bagaimana ruang yang melingkupi kelahiran konsep advokasi PKB dan bagaimana implementasi konsep tersebut serta bagaimana implementasi tersebut menurut fiqh siyasah. Pisau analisa yang digunakan untuk membedah dua pokok permasalahan tersebut adalah fungsi partai politik secara normatif, konsep kebijakan publik dan filosofis serta konsep *Maslahah Mursalah*. Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode analisis deduktif dan Interpretatif sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pada tehnik pengumpulan data penulis membagi dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumentasi kepartaian yang dimiliki oleh PKB, sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Dalam hal pendekatan, penulis menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan dalam kaitannya dengan menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadikan pedoman perilaku manusia, termasuk dalam hal ini juga adalah beberapa produk perundangan yang terkait dengan partai politik dan kebijakan publik.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara filosofis apa yang dilakukan PKB bukan merupakan penemuan baru dalam konsep perpolitikan di Indonesia, karena pada dasarnya semua partai politik mempunyai fungsi advokasi yakni berupa pembelaan terhadap masyarakat melalui produk perundang-undangan dan kebijakan publik lainnya yang populis serta mensejahterakan masyarakat luas. Pada implementasi konsep advokasi PKB, peneliti menampilkan tiga ruang aplikasinya, yakni pada ruang Hukum dan HAM, ruang Pendidikan, dan Ruang Ekonomi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal :

Lamp :

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

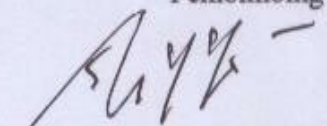
Nama : Hesbul Bahar
NIM : 03370326
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Politik Partai Kebnagkitan Bangsa (studi konsep Advokasi)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyazah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam

Demikian ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Oktober 2008

Pembimbing I


Drs. M. Rizal Qasim, M.Si
NIP 150.256.649



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal :

Lamp :

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hesbul Bahar
NIM : 03370326
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Politik Partai Kebnagkitan Bangsa (studi konsep Advokasi)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyazah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam

Demikian ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Oktober 2008
Pembimbing II


Drs. Ocktoberrihsyah, M.Ag
NIP . 150 289 435



PENGESEHAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/49/2008

Skripsi dengan judul : **Analisis Kebijakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa
(Studi atas Konsep Advokasi)**

Nama : Hesbul Bahar

NIM : 03370326

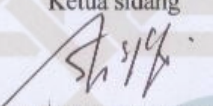
Telah dimunaqasyahkan pada Senin, 27 Oktober 2008 M/27 Syawal 1929 H

Nimai munaqasyah : A

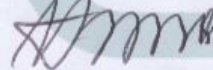
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang

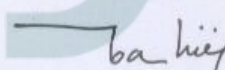

Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si
NIP. 150 256 649

Penguji I



Drs. Abd. Madiid, AS
NIP 150 192 830

Penguji II



Ahmad Bahicj, SH.M.Hum
NIP. 150 300 639


Yogyakarta, 27 Oktober 2008 M

27 Syawal 14 29 H

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah

DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

“ Jangan Pernah letih Untuk Berkarya.....!!!

“Politic is beautiful and fun”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERSEMBAHKAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:
ayah dan Bunda-ku yang tercinta dan
kakak-ku Mar'wati dan Supardi yang tersayang*

Putri Palembang. Pada saatnya akan ku wujudkan mimpi itu,

*Guru, Kiai, Ulama dan semua orang yang telah
berjasa mewarnai alam pikiranku*

*sahabat, saudara, adik, kakak, seperjuangan dan permainan-ku di P.M.I.I.
Untukmu satu tanah airku.. untukmu satu keyakinanaku..*

Kepada almaamter-ku UIN Sunan Kalijaga

Bangsa dan negeriku Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و
أصحابه أجمعين

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, dan para sahabat beliau.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul; *Analisis Kebijakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa (studi atas konsep advokas)*. Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta sekretaris jurusan dan para stafnya.
3. Bapak Drs. M Rizal Qosim M.Si selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih disampaikan kepada bapak Muhaimin Iskandar selaku ketua umu DPP PKB dan sahabat Eman Hermawan dengan gagasan “partai advokasinya” yang telah menginspirasi dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa juga kepada Mas Umaruddin Masdar yang telah banyak membantu memberikan referensi, saran serta samudera pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Tak lupa juga kepada Bapak Efendy Choiry selaku Ketua FKB DPR RI, bapak Nur Ahmad Afandy, Bapak Agus Sulistiono (keduanya Anggota FKB DPRD DIY), segenap Tim ahli FKB DPR RI yang telah banyak memberikan bantuan referensi buku dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan semuanya.
7. Keluarga kami tercinta, ayah dan bunda, *my beloved Sister* Mar’a, mas Pardi, *my cute nephew* Qiqi, *my cousin* Dandi dan semua keluarga kami di Banyuwangi dan Bali.
8. *Special regard for my Longing Irma Muthoharoh, S.Pd.i. Thanks for your time, opportunity and love. Lets spend our time for our future*
9. Untuk sahabat, saudara seperjuangan dan sepermainan, Aziz, Bandenk, Ali, Ucup, Pak Leo, Hadi, Pendi, Bony, Ryan, Rere, Zuhdan dan semua korp SANTUN 2003 yang tidak bisa kami sebutkan semuanya,

10. Sahabat-sahabat keluarga besar PMII Ashram Bangsa mulai dari angkatan 2001-2008 (Beni, Aim, Arif, Iis, Uut, Muhaimin, Ni'am, Aan, Dilla, Siyox, Darwis, Aris, Kyply, Nur, Irfana Muthi'ah, Udin, Agus, Ian) dan yang lainnya.

11. Sahabat-sahabat pengurus DEMA UIN SUKA 2005-2007. Thanks atas dialektika pengetahuan dan persekawananya.

12. Sahabat, abang, senior kami (Sofi, Kaisar, Anwar, Aul, Aboy, Jaka, Muiz) makasih atas dinamika pengetahuan dan persahabatannya

13. Kawan-kawan di Oto Sport Café; Arif Arman, Mr. Yunan, Mr. Ari', Taufiq, Didik, Banyak, Naila, Ilham, Kis, Yana, Rino, Wahyu, Ajeng, Very, Kemin, Rivo dan yang lainnya. Kalian yang telah mengajarkan aku akan indah dan nikmatnya makan sesuap nasi hasil keringat sendiri. Makasih kawan..

Semoga segala apa yang telah diberikan mendapat *jaza'* yang terbaik dari Allah SWT. Akhirnya, penyusun berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 28 Oktober 2008

Penyusun

Hesbul Bahar
03370326



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 157/1987 dan 05436/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	slâ'	sl	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	zl	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	S}âd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	d}âd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'âin	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	waû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
— ـِ	Kasrah	i	i
— ـِ ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Tanda dan huruf	Nama
يَـ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Harkat dan huruf	Nama tanda	Huruf	Nama
يَـ أَـ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis diatas
يِـ	Kasrah dan ya	i	i dan garis diatas
يُـ	Dammah dan wau	u	u dan garis diatas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fath}ah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan h

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu al (ال). Dan dalam transliterasi ini tidak dibedakan antara kata sandang yang bersambung dengan huruf qomariyah atau syamsiyah.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il atau kata kerja, isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. KONSEPSI POLITIK DAN AL MASLAHAH	19
A. Pengertian Politik.....	19
B. Partai Politik.....	22

C. Al Masalah Mursalah	29
BAB III. PROFIL DAN KONSEP ADVOKASI PKB	34
A. Profil PKB.....	34
1. Proses Pembentukan Partai.....	34
2. Mabda' Siyasy.....	37
B. Advokasi dalam Konsep	42
1. Stretegi Advokasi.....	43
2. Prinsip-Prinsip Advokasi oleh Partai Politik	45
3. .Pelaku dan Pihak yang dilibatkan	51
BAB IV ANALISIS RUANG LINGKUP KELAHIRAN DAN	
IMPLEMENTASI ADVOKASI PKB.....	53
A. Ruang Lingkup Lahirnya konsep Advokasi.....	53
B. Tujuan dan Alasan Kebijakan	55
C. Analisis Kritis Ruang Lingkup Kelahiran Konsep Advokasi.	59
D. Impelemnetasi Kebijakan Advokasi PKB.....	63
1. Advokasi pada Ruang Hukum dan HAM.....	66
2. Ruang Ekonomi.....	76
3. Ruang Pendidikan.....	83
BAB V. PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Terjemahan
- II. Biografi tokoh-ulama
- III. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terlepas dari realitas pasang surut peran partai politik yang ada hari ini, disadari atau tidak bahwa salah satu instrumen penegakan kehidupan demokrasi adalah partai politik.¹ Meski media massa dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau institusi ekstra-parlemen telah berperan besar dalam proses demokrasi, termasuk di Indonesia, dan dengan sendirinya mengurangi peran partai politik dalam menyuarakan aspirasi rakyat, namun partai politik akan tetap menjadi satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan.²

Dalam praktik politik di hampir seluruh negara modern saat ini, baik yang bercorak demokratis maupun totaliter, kehadiran partai politik tidak dapat dielakkan. Di negara-negara demokratis partai politik dipakai sebagai sarana untuk mewujudkan hak rakyat dalam menentukan figur-figur yang akan menjadi pemimpinnya, sedangkan di negara-negara totaliter, partai didirikan oleh elite politik dengan pertimbangan bahwa rakyat perlu dibina agar tercipta stabilitas yang berkelanjutan.³

Secara prosedural, proses demokratisasi di Indonesia yang berjalan sejak reformasi sudah mengalami peningkatan yang menggembirakan. Amandemen UUD

¹ Wardi Taufiq dan Ade Indra Chaniago (ed), *Sindrom Kuasa; Ancaman Sistem Politik Demokrasi*, (Jakarta: Democratic Institute, 2005) hlm. 187

² Dwight Y King disadur oleh Ir. H. Muhammad Lukman Edy, M.Si, *Reformulasi Gerakan PKB* (Jakarta&Yogyakarta: Kerjasama Sekretariat Jenderal DPP PKB, Iskandarsyah Institute dan KLIK. R, 2006) hlm. 1

³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993) cet 13. hlm.. 161-162

1945, pemilihan presiden langsung dan pembentukan beberapa institusi demokrasi yang sudah ada cukup menjadi landasan yang kokoh untuk menopang proses pembaharuan politik Indonesia. Dalam amandemen keempat UUD 1945 telah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam BAB VIIA pasal 22C-22D, Mahkamah Konstitusi, diatur dalam BAB IX pasal 24C-25, Komisi Yudisial, diatur dalam BAB IX pasal 24B⁴ dan masih banyak lagi Komisi Negara lainnya. Tradisi politik baru yang lebih demokratis sudah mulai tumbuh. Lembaga-lembaga politik juga sudah lebih tertata secara lebih baik yang memungkinkan proses demokrasi bisa berjalan sesuai prosedur yang diisyaratkan.

Namun, apakah pemilihan presiden langsung, amandemen UUD 1945 dan pembentukan beberapa institusi demokrasi berkorelasi positif dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat atau apakah proses demokratisasi juga menumbuhkan etos dan etika politik, tidak ada yang peduli. Secara substansial, kehidupan masyarakat terutama menyangkut kesejahteraan tidak kunjung membaik. Angka pengangguran tidak bisa ditekan, bahkan meningkat, hasil pusat statistik Badan Penelitian Statistik tahun 2004 menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 9,5 juta pengangguran terbuka. Jumlah ini diukur berdasarkan ukuran satu jam bekerja selama seminggu. Artinya, jumlah pengangguran yang sesungguhnya, berdasarkan kebutuhan wajar untuk bekerja jauh lebih banyak.⁵

⁴ UUD RI 1945 Paska Amandemen yang keempat

⁵ Dokumentasi Hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa Semarang, 16-19 April 2005, cet. II (Jakarta: DPP PKB, 2005) hlm. 80

Ditengah problematika kebangsaan yang semakin menggerogoti eksistensi NKRI ini, Partai politik adalah yang diharapkan menjadi garda utama penggerak demokratisasi dan instrumen untuk menyalurkan aspirasi kepentingan masyarakat sekaligus sebagai sarana kontrol bagi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah faktanya Partai politik di Indonesia cenderung mengarah pada krisis internal, elitisme dan krisis partisipasi,⁶ terlalu banyak berurusan dengan konspirasi elit terpisah dari konstituennya, dan tidak mampu menyalurkan aspirasi massa akar rumput. Walaupun terkadang ideologi yang diusung tidak seluruhnya konservatif, namun pemimpin partai kebanyakan hanya mengusung kepentingan sekelompok elit dan kurang berani melakukan inovasi politik. Bahkan, sistem partai tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Karena birokrasi yang dikuasai elit parpol tidak menjalankan prosedur partai secara demokratis, efektif dan efisien.⁷

Dewasa ini partai telah dipersepsikan sebagai bisnis politik besar, parlemen telah mempraktikkan parlementarisme yang ditandai dengan rendahnya politik sekadar alat mengangkat personel pemerintah, dan kekuatan yang mengaturnya adalah modal. Karenanya demokrasi menjadi *capito-parliamentarism*.⁸ *capito-parliamentarism* adalah sikap apatis serius dari warga negara terhadap partai politik dan parlemen. Kondisi ini diperparah seperti yang diungkapkan Daniel Dhakidae dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia seperti dikutip *Kompas* mengungkapkan bahwa intelektual kita dibentuk oleh kondisi masyarakat yang memang menyedihkan.

⁶ H. Muhammad Lukman Edy, M.Si, *Reformulasi*., hlm. 2

⁷ Syamsuddin Haris, "Partai dan Personalisasi Kekuasaan", *Kompas*, 31 Maret 2005

⁸ M. Alfian Alfian, "Bila Partai Tanpa Politisi", *Kompas*, 21 Juni 2007

Lingkungan perguruan tinggi yang semakin jauh meninggalkan universitas yang bercita-cita jadi pusat semua keunggulan. Media elektronik hanya melahirkan kaum pendengar dan penonton.⁹ Konteks pendapat Dhakidae tersebut terkait otokritik terhadap gagalnya intelektual sebagai kelompok pembaharu dimasa kini, ditengah “kerakusan politik” yang mengemuka sebagai eksekutif praktik *capito-parliamentarism*. Ketika media meninabobokan kekritisannya, tatkala partai politik tanpa politisi, dan ketika parlemen sudah mulai berlogika kapital.

Lebih Lanjut Alfian menjelaskan, dalam kondisi seperti itu, tidak heran jika banyak kalangan mencemaskan partai tanpa politisi?¹⁰ *Pertama*, partai akan kehilangan politisi-substansial alias pemain intinya. Hal ini disebabkan karena menjadi orang yang memiliki keyakinan politik dan berupaya memperjuangkannya. Tujuan mulia para politisi tentu amat terkait dengan bagaimana menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa. *Kedua*, dominannya aktor-aktor figuran alias politisi-artifisial yang memandang partai adalah suatu “bisnis politik besar” yang tidak saja bersifat protektif atas aktivitas-aktivitas bisnis para pengurusnya, Tatkala logika untung-rugi ala bisnis ekonomi telah merambah kewilayah politik, maka partai menjadi identik dengan perusahaan yang berorientasikan profit. Negoisasi politik direduksi secara substansial bahwa yang ada “membeli” dan “dibeli”.

Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu partai politik di Indonesia seperti diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional PKB tanggal 13-14 Agustus

⁹ Kompas, (Rabu 13 Juni 2007) hlm. 3

¹⁰ M. Alfian Alfian, Bila Partai., hlm. 5

2001 di Jakarta dan Muktamar Luar Biasa (MLB), 17-19 Januari 2002 di Yogyakarta telah mendeklarasikan diri menjadi PARTAI ADVOKASI.¹¹

Di dalam buku *Partai Advokasi: Wacana Keberpihakan dan Gerakan (2005)* yang diterbitkan oleh resmi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagai *guidance* dan mekanisme Advokasi yang akan dilakukan partai ini dijelaskan alasan bahwa Partai harus melakukan Advokasi adalah *pertama*, karena kerja partai politik buka 5 (lima) tahun sekali, tetapi sepanjang periode (*day to day politics*), *kedua*, Karena politik aktivitas semua pihak (non elitisme), *ketiga*, Karena kasus-kasus struktural lebih efektif jika diadvokasi partai, dan *keempat*, Karena PKB mempunyai hubungan historis, kultural dan aspiratif dengan NU.¹²

Dari konteks filosofis politik, Pilihan menjadi partai advokasi merupakan bentuk manifestasi komitmen PKB sebagaimana terumuskan dalam *mabda' siyasiy* dan *platform* partai ini, yaitu kepemimpinan politik partai melalui peran-peran mediasi politik yang diorientasikan relasi prinsip *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil-maslahah* (kebijakan pemimpin atas rakyat harus diarahkan untuk kemaslahatan).¹³

Dari semua uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konsep dan implementasi sistem Advokasi PKB, karena, pertama istilah advokasi selama ini biasa dipahami sebagai bagian dari gerakan LSM, bukan pekerjaan partai politik. Kedua, Advokasi dalam Partai Politik adalah wacana baru di

¹¹ A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi, Merawat Bangsa dengan Visi Ulama: Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa*. (Jakarta&Yogyakarta: kerjasama DPP PKB&KLIK R, 2006) hlm. 24

¹² Eman Hermawan, dkk. *Partai Advokasi: Wacana Keberpihakan dan Gerakan*, cet.II (Jakarta&Yogyakarta: Sekretariat Jenderal DPP PKB&KLIK R, 2005) hlm.. 30

¹³ A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi*., hlm.. 25

ranah partai politik di Indonesia, walaupun sejatinya fungsi partai politik itu sendiri adalah Advokasi. Skripsi ini akan meneliti historisitas yang melingkupi pilihan PKB mendeklarasikan diri menjadi Partai Advokasi, dan akan meneliti Partai Advokasi secara konseptual dan implementatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ruang lingkup yang melatarbelakangi lahirnya konsep Advokasi PKB?
2. Bagaimana implementasi dari konsep Advokasi PKB dalam perspektif Fiqh Siyasah?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menghasilkan data yang akurat dan fokus, maka peneliti akan memfokuskan diri pada penelaahan dokumentasi implementasi kebijakan Advokasi PKB pada ruang legislatif yakni FKB DPR RI yang menjadi alat perjuangan PKB diparlemen.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup yang melatarbelakangi lahirnya konsep Partai Advokasi PKB
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep advokasi PKB dalam perspektif fiqh siyasah

Sedangkan Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan pembaca tentang ruang lingkup yang melatarbelakangi konsep Partai Advokasi PKB
4. Penelitian ini diharapkan menjadi karya tulis ilmiah yang dapat menjelaskan implementasi konsep Advokasi PKB dalam perspektif Fiqh Siyasah

E. Telaah Pustaka

Berangkat dari asumsi diatas maka peneliti akan memfokuskan diri melakukan telaah pustaka terhadap Buku ataupun karya ilmiah yang membahas tentang PKB. Pustaka tersebut antara lain:

[1] Eman Hermawan, dkk, *Partai Advokasi: Wacana Keberpihakan dan Gerakan*, cet.II (2005), berbeda dengan buku panduan partai advokasi sebelumnya, buku ini bisa dikatakan sebagai penyempurnaan dari buku Panduan Kerja Advokasi. Secara umum buku ini menjelaskan lebih rinci basis ideologisasi, basis yuridis-historis dan kerangka kerja bagi advokasi yang dilakukan PKB. Secara spesifik buku ini mendeskripsikan tiga hal bentuk advokasi PKB yaitu Advokasi HUKUM/HAM, Advokasi ANGGARAN, DAN ADVOKASI KEBIJAKAN baik secara konseptual maupun implementatif.

[2] A. Muhaimin Iskandar, *MELAMPAUI DEMOKRASI, Merawat Bangsa dengan Visi Ulama: Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa* (2006). Secara umum penulis melalui buku ini merefleksikan sewindu usia PKB. Penulis yang juga sebagai ketua umum DPP PKB dengan gamblang menjelaskan strategi pengembangan PKB ditengah kompleksitas persoalan Bangsa baik dari sisi internal PKB maupun dari aspek eksternal. Yang menarik dari buku ini adalah PKB menempatkan demokrasi bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana (*wasilah*) untuk mencapai tujuan itu

sendiri. Ibarat Syari'ah yang harus ditempatkan sebagai jalan untuk mencapai tujuan-tujuan mulai dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, bukan sebagai tujuan beragama itu sendiri. Oleh karena itu PKB tidak perlu menghabiskan seluruh energinya untuk membicarakan sarana atau alat itu yang akan membuatnya kehilangan orientasi, fokus, dan keluar dari tujuan kolektif yang sudah menjadi konsensus bersama. Dalam beberapa hal, kita perlu melampaui demokrasi, bukan untuk mencederainya. Kita perlu melampaui syariat tanpa harus meninggalkannya, untuk mencapai *hakikat* dan *ma'rifat*.

[3] A. Muhaimin Iskandar, *Gusdur yang Saya Kenal: Sebuah Catatan tentang Transisi Demokrasi Kita* (2004), buku sebenarnya catatan pribadi penulis tentang sosok Gusdur. Secara global penulis pada buku ini mencoba menguraikan dinamika perjalanan demokrasi Indonesia mulai dari naiknya Abdurrahman Wahid menjadi presiden ke-empat Indonesia sampai dengan detik-detik lengsernya Gusdur melalui “kudeta politik”. Buku ini juga mengulas dinamika perjalanan PKB menuju Partai Advokasi.

[4] Wardi Taufiq dan Ade Indra Chaniago (ed) *Sindrom Kuasa, Ancaman Sistem Politik Demokrasi* (2005) Buku ini merupakan kumpulan karangan dari sejumlah penulis dalam sebuah simposium kecil tentang eksistensi dan problematika partai politik paska pemilu 2004. disamping Wardi Taufiq dan Ade Indra Chaniago penulis lain yang menyumbangkan papernya adalah Maryam Fithriarti, Prayudi, Ginda Tua Marpaung. Menurut Wardi Taufiq partai politik saat ini bergerak seolah tanpa mandat konstituen. Partai berjalan dengan agenda-agenda sendiri yang acap kali tidak merepresentasikan kepentingan kolektif organisasi dan agenda publik.

Sementara itu, Peneliti belum menemukan skripsi yang khusus membahas Advokasi dalam partai politik, ataupun Partai Advokasi PKB. Namun setelah melakukan penelusuran peneliti menemukan Skripsi Zainal Abidin Amir dengan judul Peta Islam Politik yang kemudian menjadi sebuah buku yang diterbitkan oleh LP3ES.¹⁴ Skripsi ini banyak mengupas tentang perubahan peta politik partai Islam paska reformasi. Skripsi ini juga memuat beberapa profil partai politik Islam.

F. Kerangka Teoritik

Partai politik mempunyai status dan peranan penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintah dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti oleh Schattscheider yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, "*political parties created democracy*". Oleh karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.¹⁵ Pendapat serupa juga disampaikan Dwight Y King, menurutnya partai politik sebagai satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan.¹⁶

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Pandangan yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa

¹⁴ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Paska-Soeharto* (Jakarta:Pustaka LP3ES, 2003)

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) hlm.. 153

¹⁶ Dikutip oleh H. Muhammad Lukman Edy, *Reformulasi.*, hlm. 1

partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan kebijakan-kebijakan publik tertentu *at the expense of the general will* atau kepentingan umum.¹⁷

Dari beberapa ilmuwan politik politik tersebut Ramlan Subakti merumuskan partai berikut sebagai berikut:

Kelompok anggota yang teroganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun, sebagai hasil dari pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

Selanjutnya Miriam Budiarmo menjelaskan fungsi-fungsi partai politik, yaitu¹⁹ (a) sarana komunikasi politik, (b) sarana sosialisasi politik (*political socialization*), (c) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), (d) pengatur konflik (*conflict management*). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (a) mobilisasi dan integrasi, (b) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku pemilih (*voting patterns*), (c) sarana rekrutmen politik dan (d) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.²⁰

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu*, hlm. 153-154

¹⁸ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm.. 116

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 163

²⁰ Di kutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) hlm., 159-160

Bila kita cermati secara mendalam sebenarnya partai politik telah mempunyai fungsi Advokasi, yakni advokasi terhadap warga negara. Jadi pada prinsipnya partai politik disadari atau tidak harus bisa meyerap, penghimpun dan menyelesaikan persoalan yang terjadi pada warga negara yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan negara. Dalam perspektif ilmu politik Islam (*al-fiqh siyasiy*) upaya untuk mewujudkan kesejahteraan itu didasarkan pada satu kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil-maslahah* (kebijakan pemimpin atas rakyat harus diarahkan untuk kemaslahatan²¹ Kemaslahatan disini mengandung dua arti, yaitu kesejahteraan masyarakat (*ath'amahum min al-ju'*) dan melindungi hak-hak mereka (*amanahum min al-khouf*).²²

Lebih lanjut, dalam perspektif *Fiqh as-Siyasah* atau *Siyasah as-Syar'iyah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf definisi *Siyasah as-Syar'iyah* ialah wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemadlaratan.²³ Dengan demikian siapapun yang ingin membangun pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada *Maslahah al-Mursalah*. *Maslahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang oleh hukum tidak dinyatakan kebenarannya dan juga tidak ditegaskan ketidakbenarannya.

Menurut Imam Malik *Maslahah al-Mursalah* itu merupakan salah satu dari epistemologi syari'ah. Dengan syarat bahwa: 1) kepentingan umum itu bukanlah suatu

²¹ Eman Hermawan, dkk, *Partai Advokasi*., hlm.. 12

²² A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi*., hlm. 12

²³ Abdul Aziz Dahlan (ed), dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)V: 1626, artikel "Siyasah as-Syar'iyah".

hal yang berkaitan dengan ibadat (transeden. 2) kepentingan umum itu selaras dan tidak bertentangan dengan nilai dasar Syari'ah (Al-qur'an dan Sunnah). 3) kemaslahatan umum itu haruslah merupakan kepentingan esensial yang sangat diperlukan.²⁴

Setidaknya kepentingan esensial yang diperlukan di atas sejalan dengan dirumuskannya lima tujuan syari'ah meskipun tidak *tercover* secara Kaffah, lima tujuan tersebut yaitu: memelihara kemaslahatan agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*, dan memelihara harta dan kehormatan (*hifz al-mal*)²⁵

M. Quraish Shihab mengungkapkan²⁶ bahwa dalam al-Qur'an Surat Ali Imron.3:26 tersurat bahwa Allah SWT menganugerahkan kepada manusia sebagian kekuasaan itu kepada manusia. Penganugerahan ini dilakukan melalui satu ikatan perjanjian. disatu pihak dan dengan masyarakatnya di pihak lain. Perjanjian dengan Allah dinamai oleh-Nya dalam Al-Quran dengan '*ahd*'. Sedangkan perjanjian dengan anggota masyarakat, maka ia dinamai bai'at, hal ini bisa dilihat dalam dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 7

²⁵ Ismail Muhammad Syah dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Tafsir, Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet XIII (Bandung, Mizan, 2001) hlm.. 425.

يايها النبي إذا جاءك المؤمنت يبأيعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يشرقن ولا يزنين ولا يقتلن
تغفر أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واسلمهن
الله إن الله غفور رحيم.²⁷

Perjanjian ini -baik antara sang penguasa dengan masyarakat maupun antara dia dengan Yang Mahakuasa- merupakan amanat yang harus ditunaikan. Dari sini, tidak heran jika perintah taat kepada penguasa (ulil amr) didahului oleh perintah menunaikan amanah. Perhatikan firman Allah berikut:

أن الله يأمركم أن تؤدوا الامنت ألى أهلها وأذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن الله نعماً يعظكم به
أن الله كان سميعاً بصيراً. يايهاالذين ءا منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنزعتم
في شئى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل²⁸

Kedua ayat di atas dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan atau pemerintahan. Bahkan Rasyid Ridha, seorang pakar Tafsir, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab berpendapat bahwa, "Seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang hal permerintahan, maka ayat itu telah amat memadai."²⁹

Dalam kepustakaan Islam telah lama dikenal fiqh politik (*Fiqhis Siyasa*), yang mendasari pandangannya bahwa Syari'at Islam disamping mengatur tentang ketuhanan, hubungan antara manusia dengan Tuhannya (masalah-masalah ibadah) serta akhlak, tetapi juga mencakup hubungan individu dengan daulah (negara dan pemerintah), atau hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan pejabat dengan penduduk, yang diatur dalam fiqh daulah. Politik menurut perspektif Syari'at, ialah

²⁷ Al-Mumtahanah, (60): 12

²⁸ An-Nisa' (4) 57-59

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Tafsir, Maudhu'I*,... hlm. 425.

yang menjadikan syari'at sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan anjuran-ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya. Tujuannya berdasarkan syari'at dan sistem yang dianut juga berdasarkan Syari'at. Islam adalah aqidah dan syari'ah, agama dan daulah, kebenaran dan kekuatan, ibadah dan kepemimpinan, mushaf dan perang.³⁰

Politik dalam pandangan para ulama salaf, diartikan dalam dua makna, yaitu, *Pertama*, dalam makna umum, yaitu untuk menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syari'at agama. *Kedua*, politik dalam makna khusus yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan yang dikeluarkannya untuk menangkal kerusakan yang akan terjadi, mengatasi kerusakan yang telah terjadi atau untuk memecahkan masalah-masalah khusus. Politik harus didasarkan pada fiqh Islami, yang berasal dari segala mazhab fiqh yang ada serta praktek para sahabat dan tabi'in. Dalam pelaksanaannya fiqh Islami itu berinteraksi dengan realitas kehidupan, serta berbuat untuk memecahkan berbagai problem dengan merujuk kepada syari'at. Syari'at tidak menutup mata terhadap realitas kehidupan, oleh karena itu realitas juga adalah alat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul.³¹

G. Metode Penelitian

³⁰ Yusuf Qardhawi dalam <http://warkop.wordpress.com/2007/02/27/partai-politik-islam/>, diakses 10 maret 2007

³¹M. Quraish Shihab, .Tafsir, *Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, dalam <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Politik1.html>, diakses tanggal 26 Juni 2007

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini baik yang berkaitan dengan jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data, sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dan meneliti dari buku-buku kepustakaan, dokumentasi PKB dan karya-karya dalam bentuk lainnya.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini bersifat *deskriptik-analitik*.³² Menurut Whitney, penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³³ Pada penelitian ini, peneliti akan menggambarkan utuh tentang konsep Advokasi PKB secara konseptual dan implementatif.

3. Teknik pengumpulan data

Literatur-literatur yang dijadikan sebagai data dalam penulisan skripsi ini terbagi pada dua sumber; *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Yang menjadi data-data primer dalam penelitian ini adalah dokumentasi PKB, berupa hasil muktamar, hasil musyawarah pimpinan nasional, dan produk-produk

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek*, cet.ke-2 Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

³³ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta, Ghlm.ia Indonesia, 1998) hlm 63-64

hukum yang dilahirkan DPP PKB khususnya yang mengulas tentang Advokasi, serta dokumen lain yang relevan dengan pokok pembahasan skripsi ini. Sementara itu, buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, surat kabar yang berkaitan baik dengan konsep Advokasi PKB tersebut ataupun tulisan orang lain tentang Advokasi PKB merupakan data sekunder.

Untuk mengumpulkan data-data tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi. Dokumentasi ini dimaksudkan peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen, platform dan program Partai Kebangkitan Bangsa khususnya yang berkaitan dengan Partai Advokasi. Selain itu peneliti juga menggunakan dokumentasi hasil program kerja, pernyataan sikap dan sejenisnya .

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Maksud dari pendekatan ini adalah dalam menganalisa data pendekatan dalil atau kaidah digunakan untuk melihat konsep implementasi dalam perspektif fiqh siyasah termasuk dalam hal ini juga adalah beberapa produk perundangan yang berkaitan dengan partai politik dan kebijakan publik.

5. Analisa Data

Metode analisis data, untuk analisis data penyusun menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan instrumen analisis deduktif interpretative.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penyusun membagi menjadi lima BAB. Bab I (pertama) memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Pada BAB II (kedua) peneliti akan memaparkan konsepsi politik, pemikiran politik Islam, partai politik dan masalah mursalah

Selanjutnya pada BAB III (ketiga) peneliti memaparkan tentang Platform dan Program PKB serta konsep advokasi PKB, pengertian dan tipe Advokasi, Strategi Advokasi, prinsip-prinsip Advokasi oleh Partai Politik, pelaku dan pihak yang dilibatkan dan ruang lingkup Advokasi. Sementara itu, pada BAB IV (keempat) peneliti akan memfokuskan diri pada implementasi konsep Advokasi PKB.

Terakhir adalah bab BAB V (Kelima), Penutup; berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, penulis mencoba menyusun saran-saran yang cukup relevan untuk disampaikan terkait dengan hasil

penelitian yang telah dilakukan. Dalam lampiran akan ditampilkan daftar pustaka, terjemahan ayat Al-qur'an, daftar pustaka serta daftar riwayat hidup penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partai politik mempunyai status dan peranan penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintah dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Partai merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. partai politik sebagai satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan.¹

Seperti yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya, bahwa pada prinsipnya fungsi partai itu sendiri adalah advokasi, sehingga dengan pelembagaan PKB sebagai partai advokasi adalah tak lebih dari upaya menjalankan fungsi partai agar lebih terarah, terencana dan terstruktur. Konsep advokasi yang dimiliki oleh PKB sejauh pengamatan peneliti adalah konsep advokasi yang secara umum dikenal dalam LSM ataupun lembaga-lembaga social lainnya. Namun ada beberapa kelebihan tersendiri jika advokasi itu dilakukan oleh sebuah partai politik, yakni partai politik lebih cepat terserapnya sebuah aspirasi keruang-ruang pemegang kebijakan dinegeri ini. Dengan demikian kebijakan yang akan

¹ dikutip oleh Ir. H. Muhammad Lukman Edy, M.Si, *Reformulasi.*, hlm. 1

dilahirkan nantinya memang kebijakan yang populis bagi masyarakat. Berikut beberapa kesimpulan dari skripsi ini:

1. Dilihat dari historitas kelahiran konsep advokasi tersebut secara idealitas konsep tersebut sudah merupakan jawaban terhadap krisis peran partai politik dewasa ini. Selain itu dengan dideklarasikannya partai advokasi PKB, PKB mencoba memecahkan oposisi biner yang selama ini menjadi perdebatan sengit diantara para politisi yakni partai pemerintah dan partai oposisi. Namun, ada tujuan jangka pendek atau mungkin bisa disebut sebagai tujuan pragmatis yang dilakukan oleh PKB yakni kegagalan FKB DPR RI periode 1999-2004 membendung kekuatan fraksi lain di DPR yang telah sukses melengserkan Gusdur dari kursi kepresidenan.
2. Secara konseptual Advokasi yang dimiliki oleh PKB ini sudah mencerminkan fungsi partai itu sendiri. Advokasi terhadap beberapa kasus yang telah dilakukan oleh FKB dalam arena DPR dapat dikategorikan dalam upaya menjalankan sebuah fungsi partai dan menjalankan mabda' siyasi dan AD-ART PKB itu sendiri. Sehingga hal ini sebenarnya bukanlah langkah baru didalam perpolitikan di Indonesia.
3. Ada tiga ruang implementasi dari konsep advokasi PKB yakni ruang hukum dan HAM, ruang Ekonomi dan ruang Pendidikan. Pada ruang Hukum dan HAM pembahasan RUU Perlindungan saksi dan korban serta RUU kewarganegaraan. Dalam pembahasannya kedua RUU tersebut berusaha melindungi hak hakiki dari warganegara, yakni hak untuk hidup dan memelihara keturunan dan hak untuk bersaksi karena Allah.

4. Pada ruang ekonomi dilakukan pembahasan tentang RUU Penanaman Modal dan UU system Resi Gudang. Kedua RUU tersebut berusaha menjamin kemaslahatan masyarakat luas serta melindungi hak-haknya yang merupakan salah satu perwujudan dari didirikannya Negara. secara spesifik UU system resi gudang bermaksud melindungi petani dari murahnya harga hasil tani dan kesulitan mencari modal usaha.
5. Sedangkan pada ruang pendidikan implementasi dari konsep advokasi diwujudkan dengan pembelaan kepada tiga aspek yang menurut PKB sangat signifikan perannya yakni, pesantren, madrasah dan guru bantu swasta.

Pada akhirnya apa yang dilakukan oleh PKB dengan konsep advokasinya - terlepas dari kepentingan jangka yang coba diraihinya- adalah upaya untuk meningkatkan peran partai politik sebagai kepanjangan tangan kepentingan masyarakat luas diruang-ruang dimana kebijakan publik itu muncul.

B. Saran-Saran

Ada sebuah ungkapan yang cukup menarik tentang eksistensi demokrasi di sebuah Negara yang oleh penulis akan dijadikan penutup sekaligus saran pada skripsi ini, yakni semakin demokratis sebuah Negara maka jumlah pemilih pada waktu pemilu akan semakin berkurang. Dalam konsteks ini, partai politik yang *nota bene* nya sebagai salah satu pilar demokrasi akan diuji eksistensinya melawan asumsi diatas, Dalam artian bahwa apa yang dilakukan oleh PKB sejatinya seharusnya terus-menerus melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat akan arti penting keikutsertaan mereka dalam pemilu. Konsep

advokasi yang coba digagas oleh PKB sejatinya harus benar-benar diaplikasikan kedalam ruang praktis dan tidak hanya berhenti dikonsep saja, karena sebagai apapun konsep tersebut tanpa ada aplikasi menjadi nonsen. Penulis melihat seandainya konsep advokasi benar-benar dijalankan dari tingkatan pusat-daerah maka cita-cita tentang demokrasi yang hakiki akan benar terwujud yakni masyarakat yang *melek* politik, paham akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga Negara, bisa menyalurkan aspirasi dan keinginan dalam rangka peningkatan hidup yang lebih baik.

Dan tentunya, berkaitan dengan skripsi ini penyusun mengharapkan saran dan kritik para pembaca guna memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang ada. Selain itu penyusun sendiri sadar bahwa karya ini merupakan buah pertama dari proses panjang dialektika intelektual penyusun, sehingga masih sangat dimungkinkan jauh dari kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1980.

B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Aziz Dahlan, Abdul (ed), dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)V: 1626, artikel "Siyasyah as-Syar'iyah".

C. Kelompok Lain-Lain

Abidin Amir, Zainal, *Peta Islam Politik Paska-Soeharto* Jakarta:Pustaka LP3ES, 2003

Alfian, M. Alfian *Bila Partai Tanpa Politisi*, Kompas, tanggal 21 Juni 2007

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek*, cet.ke-2 Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Budiarjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.cet 13.

_____, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1998)

DPP PKB, *Dokumen Muktamar I PKB di Surabaya, tanggal 23-28 Juli 2000*, (2000)

_____,*Partai Kebangkitan Bangsa diYogyakarta 17-19 Januari 2002* (2002)

_____, *Dokumen Hasil Muktamar II PKB di Semarang, tanggal 16-19 April 2005*, (2005).

_____, *Dokumentasi Hasil Musyawarah Kerja Nasional PKB tanggal 13-14 Agustus 2001* (2001)

- Eman Hermawan, dkk. *Partai Advokasi: Wacana Keberpihakan dan Gerakan*, cet.II Jakarta&Yogyakarta: Sekretariat Jenderal DPP PKB&KLIK R, 2005
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Cet, ke-IV, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2004).
- Haris, Syamsuddin “Partai dan Personalisasi Kekuasaan”, *Kompas*, 31 Maret 2005
- Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty,1982
- Khikmat Kami Bagimu Negeri; Laporan kerja Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI 2005-2006 (Jakarta:FKB DPR-RI,2007)
- Iskandar, A. Muhaimin dalam pengantar *Partai Advokasi: Wacana Keberpihakan dan Gerakan* (Jakarta&Yogyakarta: Kerjasama Sekretariat Jenderal DPP PKB&KLIK R, 2005) cet II
- _____. *Melampaui Demokrasi, Merawat Bangsa dengan Visi Ulama: Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa*.(Jakarta&Yogyakarta: kerjasama DPP PKB&KLIK R, 2006)
- _____. *Gusdur yang Saya Kenal: Sebuah Catatan tentang Transisi Demokrasi Kita* (Yogyakarta:LKiS, 2004)
- _____. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, John M. Echols dan Hassan Shadily, (Jakarta: Gramedia, 1981)
- _____. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* WJS. Poerwodarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983)
- Kompas, tanggal 13 Juni 2007
- LAKUM HAM DPP PKB, *Panduan Kerja ADVOKASI Partai Kebangkitan Bangsa* (2001)
- Lukman Edy, Muhammad *Reformulasi Gerakan PKB* (Jakarta&Yogyakarta: Kerjasama Sekretariat Jenderal DPP PKB, Iskandarsyah Institute dan KLIK. R, 2006)
- Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara Persadar, 1999)
- Meny, Yves dan Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*. 3rd edition. Oxford University Press, 1998

- Michels, Robert, *Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalam Birokras* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), cet IV
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998)
- Muhammad Syah Ismail dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),
- Nadzir, Muhammad *Metode Penelitian* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998)
- Putra, Fadilla, *Partai Politik dan kebijakan Publik: Analisis Terhadap Konkruenasi janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003) cet. 2
- Qardhawi, Yusuf dalam <http://warkop.wordpress.com/2007/02/27/partai-politik-islam/>. diakses 10 maret 2007
- Rozi, Syaufan, *Zaman Bergerak, Birokrasi dirombak; Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2006)
- Shihab, M. Quraish, Tafsir, *Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, dalam <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Politik1.html>. diakses tanggal 26 Juni 2007
- _____. *Wawasan Tafsir, Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 2001)
- Taufiq, Wardi dan Ade Indra Chaniago (ed) *Sindrom Kuasa, Ancaman Sistem Politik Demokrasi* ((Jakarta: Democratic Institute, 2005)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945)
- Undang Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik